

Daftar Isi

Prakata iii

Ucapan Terima Kasih vii

Daftar Singkatan ix

Bagian Pertama—Pengantar 1

Bab 1: Selayang Pandang Korupsi di Indonesia 3

Persepsi mengenai Adanya Korupsi 4

CPI 4

GCB 8

BPI 10

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 10

Persepsi dan Kenyataan 14

Biaya Penyelesaian Kasus Korupsi 17

United Nations Convention Against Corruption

(UNCAC) 18

Prevention 19

Criminalization 20

International Cooperation 21

Asset Recovery 21

UNCAC dan Perubahan Undang-undang di Indonesia 22

Catatan 25

Lampiran 26

Bab 2: Komisi Pemberantasan Korupsi 37

Pengantar 37

KPK: Tugas, Wewenang, dan Kewajibannya 37

Tugas dan Wewenang KPK 37

Tugas Koordinasi 38

Tugas Supervisi 40

Tugas Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan 41

Tugas Pencegahan 44

Tugas Pemantauan (Monitoring) 44

Kewajiban dan Larangan 45

Kasus Tipikor Tahun 2008 46

Vonis kepada Komisioner Komisi Yudisial 47

Penghentian Penyelidikan Kasus BLBI II: Jaksa Urip dan
Artalyta 48

Aliran Dana Bank Indonesia 52

Aulia T. Pohan dan Rekan-rekan Menjadi Tersangka 55

Nasib Kasus BLBI 55

Pengakuan Agus Condro Prayitno 56

Penangkapan Anggota DPR – Pengalihan Fungsi Hutan
Lindung 59

Penangkapan Anggota DPR – Lelang Departemen
Perhubungan 62

Penangkapan Komisioner KPPU dan Mantan Presiden
Direktur First Media, Tbk. 63

Sarjan Tahir Terancam Dihukum 20 Tahun 65

Bagian Kedua—Konsep Dasar 69**Bab 3: Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian 71**

Pengantar 71

Pasal 1365 KUHPer 71

Perbuatan Melawan Hukum 72

Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian 73

Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan
Kerugian 75

Catatan 76

Bab 4: Berbagai Makna Kerugian 77

Pengantar 77

Kerugian menurut Hukum Perdata 78

Kerugian menurut Hukum Administrasi Negara 80

Kerugian dalam Praktik Hukum Administrasi Negara 81
Petunjuk BPK 81

Kerugian menurut Undang-Undang tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 82

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 85

Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi 86

Pendapat Mahkamah Konstitusi 87

Kerugian dalam Praktik Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi 89

Petunjuk BPKP 89

Kerugian Negara menurut Hukum Administrasi Negara dan
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi 90Titik Singgung Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara,
dan Hukum Pidana 90

Kerugian dalam Pengertian Ilmu Ekonomi 92

Kerugian dalam Pengertian Akuntansi 94

Catatan 97

Lampiran 100

Bab 5:	Keuangan Negara: Suatu Kontroversi	103
	Keuangan Negara sebagai Batas	103
	Keuangan Negara: Suatu Kontroversi Sejak Awal	104
	Beberapa Sudut Pandang tentang Keuangan Negara	105
	Keuangan Negara menurut Undang-Undang Tipikor	111
	Keuangan Negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara	112
	Kontroversi mengenai Keuangan Negara	114
	Kekayaan yang Dipisahkan – PT Swasta	115
	Kekayaan yang Dipisahkan – Pesero BUMN	117
	Kontroversi Melahirkan Pembaruan	126
	Catatan	127

Bagian Ketiga—Praktik dan Harapan 129

Bab 6:	Tahap-tahap Berkenaan dengan Kerugian Keuangan Negara	131
	Tahap-tahap	131
	Menentukan Kerugian Keuangan Negara	132
	Menghitung Kerugian Keuangan Negara	133
	Unsur Tipikor Bila Tidak Terdapat Cukup Bukti	135
	Di Akhir Tahap Pertama dan Kedua	138
	Menetapkan Kerugian Keuangan Negara	138
	Menetapkan Besarnya Pembayaran Uang Pengganti	139
	Pemidanaan dalam Tindak Pidana Umum	139
	Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	140

Bab 7:	Menghitung Kerugian Keuangan Negara	143
	Pengantar	143
	Ringkasan D-	

Pembakuan atau Fleksibilitas?	154
Pohon Kerugian Keuangan Negara	155
Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Aset	158
Pengadaan Barang (dan Jasa)	158
Pelepasan Aset	159
Pemanfaatan Aset	160
Penempatan Aset	161
Kredit Macet	163
Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Kewajiban	164
Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata	165
Kewajiban yang Berasal dari Kewajiban Bersyarat	165
Kewajiban Tersembunyi	166
Pola Penghitungan Kerugian	166
Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan	166
Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran	170
Pengeluaran di Luar APBN	171
Pola Penghitungan Kerugian Keuangan Negara	173
Kerugian Total (Total Loss)	173
Kerugian Total dengan Penyesuaian	174
Kerugian Bersih (Net Loss)	175
Harga Wajar	175
Harga Pokok	178
Harga Perkiraan Sendiri	178
Penggunaan Appraiser	179
Opportunity Cost	180
Bunga sebagai Unsur Kerugian Keuangan Negara	181
Pola dan Fleksibilitas	181
Sumber dan Besarnya Kerugian Keuangan Negara	182
Catatan	183
Lampiran	184

Bab 8: Akuntan Forensik sebagai Ahli di Dalam dan di Luar Persidangan 191

Pengantar	191
KUHAP: Tentang Saksi dan Ahli	192
Ahli dari BPK	194
Audit Investigatif dan Akuntansi Forensik	195
Pemeriksaan oleh BPK	197
Pemeriksaan oleh BPKP dan Lembaga Lain	199
Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK	202
Ahli: Pribadi, Lembaga, dan Kredibilitas	204
Keahlian - Menghitung Kerugian Keuangan Negara	204
Audit Investigatif dan Perhitungan Kerugian	205
Independensi seorang Ahli	208
Laporan Audit Investigatif	211
Peran dan Drama	212
Contoh Penolakan terhadap Ahli	215
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia	216
Ahli dari PPATK	217
Ahli dari BPKP	217
Ahli dari Institut Teknologi Bandung	219
Ahli dari BPK	220
Kualifikasi seorang Ahli	221
Pertanyaan mengenai Independensi seorang Ahli	223
Manfaatkan Akuntan Forensik	224
Catatan	225
Lampiran	229

Anneks 233

Anneks 1: Biaya Konflik Irak 235

Perang yang Berkepanjangan 235

Terlalu

Taksiran Awal Jumlah Biaya Perang	236
Faktor-faktor yang Mendorong Kenaikan Biaya	237
Biaya-biaya yang Tidak Dihitung	240
Sistem Akuntansi yang Keliru	242
Mengacaukan Proses Anggaran	242
Kerangka Penghitungan	243
Penutup	249
Catatan	251

Anneks 2: Saksi Ahli dalam Pengadilan Pidana di Amerika Serikat 253

Pengantar	253
Mulligan tentang Saksi Ahli	254
Contoh Kasus	261
Pertanyaan	263
Menguji Teori, Teknik, atau Metode yang Digunakan Saksi Ahli	264
Catatan	267

Anneks 3: Penjualan VLCC Pertamina 269

Pengantar	269
Tanker Raksasa dan VLCC Pertamina	269
Pro dan Kontra Penjualan VLCC	270
Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat	272
Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004	272
Pihak-pihak	272
Pengadaan VLCC dan Rencana Pendanaannya	273
Rencana Penjualan VLCC	273
Proses Penjualan (Tender)	274
Tentang Goldman Sachs	275
Keterangan Para Ahli	277

Penghitungan Kerugian Negara	278
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	279
Pihak-pihak	279
Ahli I – Rheinhard Tobing	280
Tidak Ada Kerugian Negara	282
Putusan Mahkamah Agung	281
Dari Kasus Persaingan Usaha ke Kasus Tipikor?	282
VLCC: Kasus Pembelajaran	287
Catatan	287
Daftar Pustaka	295
Indeks	299
Tentang Penulis	305